

## **IMPLEMENTASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KOTA SAMARINDA**

**Siti Ramdana<sup>1</sup> Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Fajar Apriani<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu (1) sosialisasi, (2) pembentukan pengurus, (3) kesiapan kader, dan (4) kegiatan serta faktor penghambat. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dapat dilihat dari proses program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi sosialisasi, pembentukan pengurus, kesiapan kader, dan kegiatan. Sosialisasi berfungsi untuk mengenalkan program kepada masyarakat. Pembentukan pengurus berfungsi untuk mempermudah dan membantu masyarakat memahami tentang program. Kesiapan kader berfungsi untuk membina kader meningkatkan kualitas dan kuantitas kader serta keahlian para kader. Kegiatan bertujuan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Namun pelaksanaan Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai tersebut masih belum berjalan maksimal karena masih memiliki faktor hambatan yang belum teratasi secara penuh.*

**Kata Kunci : Program KKBPK**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) atas dasar Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dituntut mempunyai Renstra untuk mengimplementasikan program KKBPK.

Strategis perencanaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui pembinaan kader Kelompok Kegiatan (Poktan). Adapun Poktan tersebut yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan Poktan dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas keluarga yang ditopang oleh dua tiang utama yaitu keluarga kecil agar bebannya tidak terlalu berat, dan keluarga sejahtera dengan ekonomi yang kuat.

Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi Poktan belum optimal dalam mendukung pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan dalam Poktan itu sendiri terdapat kendala seperti adanya tingkat pengetahuan dari kader yang berbeda-beda dalam mengetahui tugas pokoknya. Disamping hambatan tersebut masih dirasakan adanya beberapa warga masyarakat yang bersifat acuh terhadap kehadiran kader Poktan dalam kehidupan masyarakat yang sedang membina. Selanjutnya masih terbatasnya jumlah kader atau anggota yang minim berpartisipasi dalam Poktan.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang dihadapi adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda?

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis yaitu diharapkan menjadi bahan bacaan, referensi kajian dan rujukan akademis serta menambah wawasan bagi peneliti dalam perspektif analisis kebijakan publik.
2. Segi Praktis
  - a. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, dan Pemerintah Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Bagi universitas diharapkan dapat bertambahnya referensi penelitian dari mahasiswa khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Sehingga dengan sendirinya dapat menambah kelengkapan daripada ilmu itu sendiri;
  - c. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga demi mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera; dan
  - d. Bagi penulis diharapkan dapat meningkatkan daya pikir penulis guna pembentukan wacana berpikir serta mengembangkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Teori dan Konsep***

#### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Dunn (dalam Pasolong, 2014:39), bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Program merupakan kebijakan publik, menurut Kunarjo (2002:78) program adalah perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus.

Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat Undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2008:438) implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta atau para pejabat yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sebagaimana implementasi kebijakan menyangkut tiga hal sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan

### ***Kebijakan Pembangunan Kependudukan***

Hatmadji (2003:58) mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan kependudukan adalah kegiatan dan program yang dibuat untuk menunjang pencapaian tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik, dengan cara mempengaruhi variabel-variabel demografi yang penting yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi geografi dan karakteristik demografinya.

Selanjutnya Hatmadji (2003:55) mengemukakan bahwa kebijakan kependudukan tidak saja dimaksud untuk mempengaruhi aspek kuantitas (jumlah, komposisi, distribusi) penduduk tetapi juga aspek kualitas penduduk masa yang akan datang. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu demografi (pertumbuhan, komposisi, distribusi, dan mobilitas penduduk) serta dimensi sosial ekonomi, politik dan ekologi (pendidikan, kesehatan, kebebasan dan kualitas hidup).

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mengatur interval diantara kehamilan (Hartanto, 2007:27). Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga berencana merupakan gerakan untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia melalui penurunan tingkat kelahiran secara bermakna.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dengan demikian pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 47 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga”.

### ***Definisi Konsepsional***

Adapun definisi konsepsional yang dapat dikemukakan yaitu Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, adalah

pelaksanaan dari program untuk membantu keluarga sebagai unit terkecil dalam lapisan masyarakat mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas dan membantu kelompok kegiatan masyarakat meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan yang baik dan benar.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

### ***Fokus Penelitian***

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dapat dilihat dari:
  - a. Sosialisasi
  - b. Pembentukan Pengurus
  - c. Kesiapan Kader
  - d. Kegiatan
2. Faktor penghambat implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dari narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipadu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu (a) *Key-informan* adalah Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. (b) *Informan* adalah Pegawai dan Staf Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kantor DPPKB Kota Samarinda menggunakan teknik *purposive sampling*. *Informan* lainnya adalah Ketua Poktan dan Anggota atau Kader Poktan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :

- a. Dokumen-dokumen, laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun prosedur pengumpulan data dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan untuk pengolahan data, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Riset Pustaka (*Library Research*), yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan dengan mempelajari teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dari literatur-literatur atau buku-buku perpustakaan, catatan, bacaan lain agar dapat membentuk dalam penemuan masalah pemecahan dan menguji kebenaran dari hasil pemikiran.
2. Riset Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan sistematis dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti. Nasution (dalam Sugiyono, 2017:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
  - b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data. Menurut Esterbeg (dalam Sugiyono 2017:233) terdapat beberapa macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.
  - c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip-arsip dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai sumber data.

### ***Teknik Analisis Data***

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verification*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Impelementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.***

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga belum terlaksana secara menyeluruh sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya kurang berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengikuti program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut. Selain itu rendahnya kualitas kader mempengaruhi dalam mensosialisasikan program KKBPK tersebut. Akibat kurangnya peran kader Poktan Kelurahan Temindung Permai dalam melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) untuk memberikan dorongan kepada masyarakat pada umumnya khususnya keluarga yang memiliki balita/anak/remaja/lansia sehingga masih ada keluarga yang pengetahuannya tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga rendah. Sebagaimana sosialisasi program dilaksanakan sebagai upaya untuk terus menerus meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta kader dan masyarakat dalam Poktan. Untuk itu perlu adanya Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kepada kader/masyarakat pada Kelurahan Temindung Permai.

### **2. Pembentukan Pengurus**

Pembentukan pengurus dalam pelaksanaan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga belum terjalankan secara merata. Adanya pengurus Poktan yang belum dibentuk yaitu Poktan BKR. Selain itu Kampung KB juga belum terealisasikan padahal wacana Pemerintah Kota mencanangkan bahwa tahun ini minimal 1 Kelurahan memiliki 1 Kampung KB. Pembentukan kepengurusan Poktan di Kelurahan Temindung Permai dilakukan melalui musyawarah dari tokoh masyarakat, ibu-ibu dari warga setempat, dan PKB Kelurahan. Mekanisme pembentukan pengurus tersebut dengan menunjuk, mengangkat dan menetapkan warga yang bersedia menjadi pengurus melalui Surat Keputusan (SK) yang disahkan oleh Lurah Temindung Permai. Untuk kelurahan Temindung Permai saat ini yang telah dibentuk ialah Poktan BKB Rahayu dan BKL Rahayu melalui musyawarah dari tokoh masyarakat, ibu-ibu warga RT. 25, 28, 29 di Jalan S. Parman pada tanggal 9 Maret 2016. Pembentukan Poktan BKB Rahayu dan BKL Rahayu dilaksanakan di RT 25 Kelurahan Temindung Permai dan untuk Poktan UPPKS Melati dilaksanakan di RT 06 Kelurahan Temindung Permai pada tanggal 15 September 2015. Pengurus tersebut dibentuk dengan periode kepengurusan tahun 2016-2021.

### **3. Kesiapan Kader**

Untuk mempersiapkan kader dengan melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas kader yaitu dengan melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi kader, serta pemberian buku materi/buku pedoman bagi kader. Dalam rangka pemberian informasi dan peningkatan pengetahuan/keterampilan



para kader. Untuk Poktan kelurahan Temindung Permai belum memiliki buku materi/buku pedoman pegangan kader. Sebagaimana kader hanya dapat memegang buku pedoman tersebut jika telah mengikuti pelatihan. Sedangkan untuk Kelurahan Temindung Permai hingga saat ini belum pernah dilaksanakan pelatihan bagi kader poktan. Saat ini para kader tetap melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin dengan kemampuan terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan dan penyuluhan untuk menumbuh kembangkan keahlian, serta buku pedoman sebagai pegangan kader untuk meningkatkan keterampilan bagi para kader dalam menunjang pelaksanaan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### **4. Kegiatan**

Poktan BKB, BKR, dan BKL, serta Poktan UPPKS pada dasarnya dilakukan melalui kegiatan pertemuan diskusi, penyuluhan, pembinaan dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Namun, kegiatan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai belum terlaksanakan dengan maksimal. Karena rendahnya pemahaman kader dalam kegiatan apa saja yang harus dikerjakan dalam Poktan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan bagi kader. Padahal setelah dibentuk kepengurusan seharusnya diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para kader sehingga mereka mampu melaksanakan kegiatan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sebagaimana pelatihan, penyuluhan, pembinaan dan kegiatan lainnya semua bergantung pada kesediaan sarana dan prasarana serta anggaran untuk mengadakan kegiatan. Namun, hingga saat ini Poktan masih kekurangan anggaran dan tidak memiliki sekretariat/tempat melaksanakan kegiatan, serta tidak ada buku pedoman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Poktan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### ***Faktor Penghambat Impelementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.***

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu :

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di DPPKB Kota Samarinda.
- b. Kurangnya anggaran.
- c. Rendahnya dukungan dari Kelurahan Temindung Permai dan Instansi Terkait.

- d. Rendahnya respon dan pengetahuan masyarakat terhadap program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Sarana dan prasarana tidak memadai.
- f. Rendahnya kualitas kader.
- g. Minimnya kelompok kepengurusan.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan beberapa hal mengenai Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dilaksanakan secara *holistic integratif* bersama sektor terkait melalui operasional KKBPK dibawah arahan dan pengawasan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda. Namun, pelaksanaan Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai kurang berjalan maksimal disebabkan masih terdapat beberapa hambatan di dalamnya.
2. Proses dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, secara terperinci meliputi :
  - a. Sosialisasi dalam pelaksanaan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga masih belum terealisasi dengan baik, dikarenakan sosialisasi tidak terlaksana secara menyeluruh yang menyebabkan rendahnya minat warga untuk mengikuti Program KKBPK tersebut. Akibat kurangnya dukungan dari DPPKB serta kurangnya pengaruh pihak dari Lurah setempat.
  - b. Pembentukan pengurus Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga belum terlaksana secara merata, dimana dalam pembentukan pengurus di Kelurahan Temindung Permai masih belum dibentuk Poktan BKR serta sulitnya membentuk pengurus menjadi faktor penghambat terbentuknya Kampung KB di Kelurahan Temindung Permai.
  - c. Kesiapan kader Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga masih terbatas hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan sebagai bentuk tindak lanjut dibentuknya kader tersebut serta tidak adanya Buku Pedoman Poktan.
  - d. Kegiatan dari Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya anggaran dan sarana prasarana sebagai penunjang terlaksananya

kegiatan tersebut. Serta kader masih belum mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan akibat tidak adanya Buku Pedoman dan pelatihan kader.

3. Faktor Penghambat Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda antara lain :
  - a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di DPPKB Kota Samarinda.
  - b. Kurangnya anggaran.
  - c. Rendahnya dukungan dari Kelurahan Temindung Permai dan Instansi Terkait.
  - d. Rendahnya respon dan pengetahuan masyarakat terhadap program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - e. Sarana dan prasarana tidak memadai.
  - f. Rendahnya kualitas kader.
  - g. Minimnya kelompok kepengurusan.

### **Saran**

Adapun saran sebagai masukan yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Kurangnya anggaran mengakibatkan pelatihan dan orientasi kepada kader dalam mempersiapkan kader tidak dapat dilaksanakan. Serta kegiatan lainnya tidak dapat berjalan maksimal karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti sekretariat, buku pedoman dan sebagainya. Untuk Poktan UPPKS masih perlu pembinaan permodalan. Sehingga harus lebih memperhatikan anggaran salah satunya dengan terus mendukung dalam bentuk pembinaan permodalan pada Poktan. Karena kurangnya anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program KKBPK tersebut salah satunya berpengaruh pada kualitas kader akibat sulitnya mengadakan pelatihan bagi kader tersebut.
2. Sejak pembentukan kepengurusan pada tahun 2016 hingga saat ini para kader belum pernah mengikuti pelatihan dan orientasi. Seharusnya lebih ditingkatkan lagi kualitas kader agar mampu menarik minat warga untuk mengikuti Program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, orientasi, pertemuan dengan diskusi ringan dan pembinaan.
3. Para kader masih bingung Tupoksinya dan tidak memahami kegiatan yang harus dilakukan hal ini karena sampai sekarang masih belum memiliki buku panduan. Segera diberikan Buku Pedoman bagi kader sehingga mereka dapat memahami dengan baik tugas poktan masing-masing.
4. Kelurahan Temindung Permai masih belum terbentuk Poktan BKR. Karena sulitnya mencari anggota masyarakat yang bersedia menjadi kader hal ini juga mengakibatkan kendala pembentukan Kampung KB. Untuk itu terus

melakukan peningkatan jumlah SDM yakni dengan pembentukan kepengurusan Poktan yang belum ada dan penambahan pengurus Poktan serta pembinaan Poktan yang ada agar tetap bertahan.

5. Lebih rutin lagi melaksanakan sosialisasi dengan meningkatkan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap masyarakat wilayah Kelurahan Temindung Permai. Sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam Program KKBPK tersebut.
6. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran dan sarana dan prasarana. Oleh karena itu hendaknya ditingkatkan lagi advokasi terhadap semua UPD dan Instansi Terkait sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan program KKBPK Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Baik dukungan dalam bentuk material maupun sarana dan prasarana atau bentuk dukungan lainnya. Sebagaimana semua UPD bertanggungjawab atas suksesnya Program KKBPK tersebut. Dengan kata lain pentingnya peran yang bersinergis antar DPPKB Kota Samarinda dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program KKBPK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Adioetomo, dkk. 2010. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Solemba Empat.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Handayani, Sri. 2010. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Hartanto, Hanafi. 2007. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi Edisi 2*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hatmadji, Sri Harijati. 2003. *Kebijakan Kependudukan di Indonesia : Analisis Data Sensus dan Survei*. Jakarta: Lembaga Demografi-FEUI.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kriyanto, Rachmat. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Miles, Matthew. B, Huberman, A. Michael, dan Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications.

- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Ratih Sulistyastuti Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung : Refika Aditama.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.

### **Dokumen-Dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Buku Saku Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kegiatan UPPKS, BKKBN, Provinsi Kalimantan Timur.

Panduan Bina Keluarga Percontohan (BKB, BKR, BKL), BKKBN, Provinsi Kalimantan Timur.

Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR), BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, BKKBN Nasional.